

ABSTRAK

ANALISIS PASAL 11, 12, 13, DAN PASAL 14 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep)

Oleh: Mohammad Aunul Abhed, Zainuri dan Arif Santoso.

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya. Maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme proses hukum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mendeskripsikan mekanisme proses hukum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Sosio Legal. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Penerapan mekanisme proses hukum pidana terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkotika juga akan menjalanisidang disiplin di Komisi Etika Profesi Polisi setelah melewati persidangan di Pengadilan Negeri. Pertanggung jawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama.

Setiap anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus mengikuti proses dan mekanisme hukum yang ada, serta diharapkan bisa kooperatif dalam menjalani proses hukum. Anggota polisi lainnya harus mendukung dalam berjalannya proses hukum yang ada dan jangan ada oknum-oknum polisi lain yang melindunginya.

Kata Kunci: Pemberhentian Anggota Polisi, Tindak Pidana dan Narkotika.

ABSTRACT

ARTICLE ANALYSIS ARTICLE 11, 12, 13, AND ARTICLE 14 REGULATION OF GOVERNMENT NUMBER 1 OF 2003 CONCERNING STOPPING OF POLICE MEMBERS OF POLICE MEMBERS OWNED BY POLICE MEMBERS THAT DO THE NARCOTIC CRIMINAL ACTION (Case Study at Sumenep District Police Department)

By: Mohammad Aunul Abhed, Zainuri and Arif Santoso.

The rampant abuse of narcotics has a negative impact on the quality of Indonesia's human resources, which is one of the assets for national development. It is said to be a carrier of immorality because its use will suffer mental, physical and social damage. The use of narcotics is not for medicinal purposes on the contrary according to its properties while narcotics results in psychological or physical dependence on the users. So in this writing, some formulations of the problem are determined, namely how the legal process mechanism for police officers who commit criminal acts of narcotics abuse and how criminal responsibility is for unscrupulous members of the National Police who commit narcotics crimes according to Government Regulation No.1 of 2003 concerning dismissal of Polri Members.

The aim of the research to be achieved is to describe the legal process mechanism for police officers who commit criminal acts of narcotics abuse and how criminal responsibility is for unscrupulous members of the National Police who commit narcotics crimes according to Government Regulation No.1 of 2003 concerning dismissal of members of the National Police.

This research uses the socio legal research method. To approach the problem using a sociological juridical research approach. Types of data or sources of legal materials used are primary and secondary data.

The application of the criminal legal process mechanism for police officers involved in narcotics cases will also undergo disciplinary proceedings at the Police Professional Ethics Commission after passing the trial at the District Court. Criminal liability for members of the police who are involved in narcotics abuse can be seen from the actions they have committed. Enforcement of criminal law against members of the police who commit crimes of narcotics abuse applies to all people, namely in the eyes of the same law.

Every member of the police who is involved in narcotics crime must follow the existing legal processes and mechanisms, and are expected to be cooperative in undergoing the legal process. Other police officers must support the ongoing legal process and do not have other police officers protect them.

Keywords: *Dismissal of Police Members, Criminal Acts and Narcotics.*